

PENTINGNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA MAKASSAR

The Importance Of Communication And Information In The Implementation of Disaster Management Policy In Makassar City

Ahmad Syarif¹, Andi Alimuddin Unde², Laode Asrul³

*¹Bagian Jurnalistik, Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanudin, trust_potter@yahoo.co.id*

²Bagian Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin

,³Bagian Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin

Abstrak

Kota Makassar adalah salah satu wilayah di Sulawesi Selatan dengan potensi indeks rawan bencana yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya komunikasi dan informasi dan faktor-faktor apa yang berperan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mengorganisasikan data, yaitu menggabungkan kelompok data yang satu dengan yang lainnya sehingga data yang dianalisis berada dalam satu kesatuan dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsur yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. Ada tiga dimensi yang menjadi indikator pentingnya komunikasi dan informasi, yaitu: koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kemudian pelaksanaan implementasi kebijakan dianalisis dengan empat faktor yang berperan penting, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Semua aspek atau dimensi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar masih perlu ditingkatkan agar upaya pengurangan risiko bencana lebih maksimal dan efektif.

Kata kunci : komunikasi dan informasi, bencana, implementasi kebijakan

Abstract

Makassar City is one of the areas in South Sulawesi with potential high hazard index. The aims of the research were to find out the importance of communication and information and the factors which had a role in the implementation of disaster management policy in Makassar City. The research used qualitative and quantitative methods. The methods of obtaining the data were questionnaire, interview, observation and documentation, so the data analyzed were in one unity and presented in the form of frequency table. The results of the research indicate that communication and information are the most important elements in the implementation of disaster management policy in Makassar city. There are three dimensions as the indicators of the importance of communication and information, i.e. coordination, integration and synchronization. Then, the implementation of policy implementation is analyzed by four factors having important roles, i.e. communication, resources, disposition and bureaucratic structure. All of those aspects categorized moderate meaning that the implementation of disaster management in Makassar City still needs increasing so that the decrease of disaster risk more maximum and effective.

Key words: communication and information, disaster, policy implementation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang secara geologis terletak di dalam jalur lingkaran bencana gempa (*Ring of Fire*). Jalur sepanjang 1.200 km dari Barat sampai Timur Indonesia yang merupakan batas-batas tiga lempengan besar dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Euresia dan Pasifik, akan berpotensi memicu berbagai kejadian alam yang besar. Berada pada pertemuan tiga sistem pegunungan (Alpine Sunda, Circum Pacific dan Circum Australia), lebih 500 gunung api (128 aktif), negara kepulauan, 2/3 air, 500 sungai besar dan kecil (30% melintasi wilayah padat penduduk), jumlah penduduk besar dan tidak merata, keanekaragaman suku, agama, adat, budaya, golongan. Sehingga 87% wilayah Indonesia adalah daerah rawan bencana (Purnomo, 2010)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Penanggulangan bencana tersebut telah diatur dalam undang-undang mulai dari masa prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Chamsah (2007), menegaskan kompleksitas bencana di Indonesia, harus ditangani oleh semua pihak yang secara formal sebagai penanggungjawab kejadian

yang berhubungan dengan bencana alam dan bencana sosial lainnya. Bencana alam yang secara kuantitas meningkat perlu ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Dampak sosial, ekonomi yang semakin luas memang tidak mudah untuk ditanggulangi dengan cepat oleh pemerintah sendiri, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan masyarakat.

Penanganan bencana sesungguhnya juga bukan semata-mata mengandalkan kemampuan untuk memberikan bantuan material saja, tetapi memberikan dukungan moral kepada mereka yang terkena bencana menjadi suatu keharusan. Sistem komunikasi dan informasi menjadi penting dalam siklus manajemen bencana, terutama agar masyarakat lebih siap dalam merespon bencana di masa yang akan datang. Komunikasi didefinisikan sebagai aplikasi yang spesifik terhadap kampanye komunikasi perubahan sosial dalam ilmu pengetahuan, perilaku, dan tindakan di tingkat individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan bencana.

Menurut Frank Dance dalam Littlejohn *et al.*, (2011), salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

Dalam situasi bencana masing-masing elemen pemerintah tidak terkoordinasikan dengan baik, tentu saja akan berdampak kepada munculnya informasi penanganan bencana yang bervariasi. Kalau semua pesan yang dieksplorasi memberikan dukungan kepada

korban, tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana jika muncul berbagai pesan yang tidak bertanggungjawab, tanpa sumber yang jelas. Tentu saja akan berdampak buruk terhadap masyarakat sebagai korban bencana yang sesungguhnya perlu diberikan informasi akurat yang bisa mententeramkan mereka secara kejiwaan.

Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi yang baik tentunya sangat dibutuhkan dalam usaha penanganan bencana, seperti memprediksi adanya potensi bencana, maka dibutuhkan data geografis sebuah daerah, atau ketika dideteksi akan terjadi bencana maka dibutuhkan sarana untuk dapat menyebarkan informasi kemasyarakatan dalam waktu yang cepat. Demikian juga ketika terjadi bencana, dibutuhkan pertukaran informasi antara petugas di lapangan dengan pusat penanganan bencana (Sembiring, 2007).

Sistem komunikasi dan informasi yang ada sedapat mungkin harus terkoordinasi dengan cepat, tepat dan akurat serta dapat diakses dengan mudah bagi siapa saja yang membutuhkannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui pentingnya komunikasi dan informasi dan faktor-faktor apa yang berperan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar.

BAHAN DAN METODE

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) yaitu metode yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2012), penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) adalah merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan

menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi.

Metode kombinasi ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dimana data kuantitatif tersebut diperoleh melalui data sekunder. Data yang diperoleh melalui instrumen pendekatan kuantitatif kemudian ditindaklanjuti dengan metode kualitatif yaitu wawancara mendalam.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Instansi Pemerintah Kota Makassar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kecamatan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian akan berlangsung selama dua bulan, dimulai pada bulan Juli-Agustus 2014.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah Kota Makassar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kecamatan Kota Makassar.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *purposive sampling*, dimana sampel akan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu yaitu instansi pemerintah Kota Makassar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kecamatan Kota Makassar yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar.

Unit analisis penelitian ini adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintah kecamatan. Dengan demikian, masing-masing unit kerja akan diwakili oleh seorang pimpinan/staff.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara mendalam (*depth interview*), observasi dan dokumentasi. *Depth interview* dilakukan untuk memperoleh data dan mengetahui informasi lebih mendalam dari informan secara langsung terkait pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. Observasi dilakukan untuk melengkapi format pengamatan sebagai instrument untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar.

Untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Menurut Bungin (2011), informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Maryaeni (2005), adalah analisis merupakan kegiatan: (1) pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh; (2) pengorganisasian data dalam formasi, kategori, ataupun unit perian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti; (3) interpretasi peneliti berkenaan dengan

signifikasi butir-butir ataupun satuan data sehingga membawa kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu untuk pendekatan kuantitatif menggunakan model analisis dekriptif kuantitatif. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data, yaitu menggabungkan kelompok data yang satu dengan yang lainnya sehingga data yang dianalisis berada dalam satu kesatuan dan disajikan dalam bentuk bagan-bagan atau tabel frekuensi.

Data yang diperoleh melalui instrumen pendekatan kuantitatif, kemudian kecen-derungan dari hasil penemuan pendekatan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendekatan kualitatif yaitu wawancara mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan kondisi fisik dan kondisi sosial hasil penelitian kuantitatif mengapa kecenderungan itu terjadi.

HASIL

Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ancaman bencana di Kota Makassar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam terdiri dari gempa bumi, tsunami, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, risiko cuaca ekstrim,

epidemi dan wabah. Ancaman bencana yang disebabkan faktor non alam yaitu kebakaran gedung dan pemukiman, epidemi dan wabah penyakit dan konflik sosial.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar masih ditemukan beberapa hambatan, diantaranya; pada aspek perencanaan, koordinasi antar pihak masih lemah, hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur secara lebih luas dan terinci tentang tugas dan peran setiap instansi dan lembaga misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kota Makassar.

Pada kondisi normal, distribusi informasi terkait dengan peringatan dini adanya potensi bencana, seringkali tidak terdeseminasi secara cepat dan tepat. Hal ini disebabkan karena sistem birokrasi yang panjang dan belum terintegrasi perangkat komunikasi masing-masing pihak yang berkepentingan dalam membagi informasi peringatan dini.

Pada kondisi tanggap darurat, juga sering muncul permasalahan klasik di lapangan, seperti tumpang tindih distribusi logistik untuk beberapa item kebutuhan, sementara pada sisi lain terkadang ada sejumlah item kebutuhan yang justru tidak terlayani (tidak terpenuhi). Hal ini disebabkan karena data tentang dampak dan penilaian kebutuhan masyarakat terdampak tidak akurat sehingga dalam penyusunan rencana kebutuhan tanggap darurat tidak tepat jumlah dan tepat sasaran.

Pada kondisi pasca bencana, beberapa kelemahan yang ditemukan lebih kepada minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam melakukan penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana. Hasil penilaian kerugian dan kerusakan ini menjadi penting sebagai bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.

Analisis Dimensi Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari dimensi komunikasi dan informasi sebesar 3,47 yang berada pada kategori baik, artinya bahwa responden berpersepsi baik pada dimensi komunikasi dan informasi. Pernyataan yang memiliki skor terendah adalah integrasi informasi sedangkan skor tertinggi adalah kerjasama atau koordinasi dengan pihak lain dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Analisis terhadap Implementasi Kebijakan

Analisis data terhadap implementasi kebijakan terdiri dari dimensi komunikasi, dimensi sumberdaya, dimensi disposisi dan dimensi struktur birokrasi.

Analisis Dimensi Komunikasi

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari dimensi komunikasi sebesar 3,35 yang berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa responden atau staff berpersepsi sedang pada dimensi komunikasi. Pernyataan yang memiliki skor terendah adalah pemerintah mengadakan sosialisasi secara tidak langsung dan pedoman yang digunakan sedangkan skor tertinggi adalah tingkat pemahaman staff terhadap tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Analisis Dimensi Sumberdaya

Berdasarkan tabel 3, diketahui rata-rata skor yang diperoleh sebesar 3,12 berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa responden berpersepsi cukup baik pada dimensi sumberdaya. Pernyataan yang dinilai baik adalah keterlibatan staff dan bantuan dana dari pemerintah sedangkan nilai terendah adalah ketersediaan fasilitas yang dianggap belum memadai.

Analisis Dimensi Disposisi

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa rata-rata skor yang diperoleh sebesar

2,63 tidak baik, artinya bahwa responden berpersepsi tidak baik pada dimensi disposisi. Aspek yang dinilai sudah baik adalah usaha yang dilakukan oleh staff untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, sedangkan aspek yang masih kurang adalah pemberian insentif.

Analisis Dimensi Struktur Birokrasi

Berdasarkan tabel 5, diketahui skor rata-rata yang diperoleh pada dimensi struktur birokrasi sebesar 2,90 berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa responden berpersepsi cukup baik pada dimensi struktur birokrasi. Pernyataan aspek yang dinilai baik adalah ketersediaan tim khusus sedangkan aspek yang dinilai belum baik adalah pertemuan dengan pemerintah untuk membahas permasalahan program.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsur yang penting dan faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jika dikaji pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan tentu saja untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Pada implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III dalam Agustino (2006), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1)

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi menurut Agustino (2006), merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Menurut Winarno (2005), Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Pada penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar, pesan yang ingin disampaikan adalah konsep umum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sosialisasi kepada pihak lain yang berkepentingan melalui sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau tingkatan, yaitu: sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, sosialisasi tingkat kecamatan dan sosialisasi tingkat kelurahan.

Pelaksanaan program penyelenggaraan penanggulangan bencana

tentunya harus didukung terhadap sumberdaya (*resources*). Menurut Edward III dalam Agustino (2006), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Edward III mengkategorikan sumber daya: "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed*".

Keberhasilan implementasi kebijakan juga bukan ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan untuk memiliki kebijakan yang sedang dimple-mentasikan. Dan disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan dimana akan menguntungkan bukan hanya organisasinya tetapi juga dirinya sendiri. Kecakapan saja tidak cukup tanpa komitmen dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005), mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Menurut pendapat Metter dan Horn dalam Agustino (2006), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Peny-elenggaraan dan pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana me-merlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor terkait lainnya.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut pula adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005), terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *standard operational procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik terutama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar.

Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan khususnya dalam penye-lenggaraan penanggulangan bencana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsur yang penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada saat pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Penyelenggaraan penang-gulangan bencana harus dibangun komunikasi integratif dan kohesif yang setara antara pemerintah, masyarakat dan sektor terkait lainnya. Penyelenggaraan penang-gulangan bencana di Kota Makassar dinilai sudah cukup baik. Namun, belum didukung sepenuhnya oleh semua sektor yang terkait. Hal ini disebabkan karena ada belum adanya regulasi yang mengatur secara lebih luas dan terinci tentang tugas dan peran setiap instansi pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kota Makassar

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chamsah, Bachtiar. (2007). *Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional Manajemen Bencana. Universitas Tarumanagara.
- Cook Curtins W & Hunsaker Philip. (2007). *Management and Organizational Behaviour*. New York: McGraw-Hill Education.
- Littlejohn, Stephen. W. & Foss, Karen. A. (2011). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maryaeni. (2005). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purnomo, Hadi dan Ronny Sugianto. (2010). *Manajemen Bencana Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*. Yogyakarta: Medpress
- Sembiring, Kritis. (2007). *Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Institut Teknologi Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2005). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Presindo.

Lampiran**Tabel 1. Analisis Dimensi Komunikasi dan Informasi**

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata- Rata
		Sangat Penting	Penting	Cukup Penting	Tidak Penting	Sangat Tidak Penting	
1.	Kerjasama atau koordinasi dengan pihak lain	6	8	8	2	0	3,75
2.	Integrasi informasi	1	9	10	4	0	3,29
3.	Sinkronisasi kegiatan	1	11	9	2	1	3,38
Rata-rata skor dimensi komunikasi dan informasi							3,47

Sumber: Analisis data Primer, 2014

Tabel 2. Analisis Dimensi Komunikasi

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata- Rata
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1.	Sosialisasi oleh pemerintah	3	10	7	4	0	3,50
2.	Pemerintah mengadakan pelatihan	0	12	5	6	1	3,17
3.	Sosialisasi secara langsung	1	12	7	3	1	3,38
4.	Sosialisasi secara tidak langsung	0	7	8	8	1	2,88
5.	Pedoman yang digunakan	0	5	12	7	0	2,92
6.	Kejelasan isi pedoman	0	10	11	3	0	3,29
7.	Tingkat pemahaman staff	3	10	10	1	0	3,63
Rata-rata Skor dimensi komunikasi							3,25

Sumber: Analisis data Primer, 2014

Tabel 3. Analisis Dimensi Sumberdaya

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata- Rata
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1.	Jumlah tenaga dalam program	2	6	7	9	0	3,04
2.	Keterlibatan staff	3	7	10	4	0	3,38
3.	Ketersediaan fasilitas	0	5	10	9	0	2,83
4.	Kemudahan penggunaan fasilitas	0	7	14	3	0	3,17
5.	Keterpeliharaan fasilitas	0	6	15	3	0	3,13
6.	Bantuan dana dari pemerintah	2	11	6	4	1	3,38
7.	Ketersediaan dana	0	6	10	7	1	2,88
Rata-rata skor dimensi sumberdaya							3,12

Sumber: Analisis data Primer, 2014

Tabel 4. Analisis Dimensi Disposisi

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata- Rata
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1.	Usaha staff untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program	0	7	11	6	0	3,04
2.	Pemberian insentif	0	0	7	15	2	2,21
Rata-rata skor dimensi disposisi							2,63

Sumber: Analisis data Primer, 2014

Tabel 5. Analisis Dimensi Struktur Birokrasi

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata- Rata
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai	
1.	Ketersediaan <i>SOP</i>	0	4	13	6	1	2,83
2.	Kejelasan <i>SOP</i>	0	7	12	3	2	3,00
3.	Ketersediaan tim khusus	0	10	6	7	1	3,04
4.	Ketersediaan <i>Job Description</i>	0	6	10	7	1	2,88
5.	Kejelasan <i>Job Description</i>	0	5	13	5	1	2,92
6.	Pertemuan dengan pemerintah untuk membahas permasalahan program	2	4	8	6	4	2,75
Skor rata-rata dimensi struktur birokrasi							2,90

Sumber: Analisis data Primer, 2014